

**Analisa Peranan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba
Di Polres Rembang Jawa Tengah**Jonner Turnip^{*}, Sri Endah Wahyuningsih^{**}, Maryanto^{***}

- ^{*} Polres Rembang, Mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, email jonnerturnip77@gmail.com
- ^{**} Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
- ^{***} Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

ABSTRAK

Penelitian dengan judul "*Analisa Peranan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba di Polres Rembang Jawa Tengah*". Berdasarkan uraian dalam Penelitian ini, permasalahan yang akan yang akan di teliti adalah: 1). Apakah penyalahgunaan narkoba terjadi di wilayah hukum Polres Rembang ? 2). Bagaimana peran penyidik Polri dalam penanganan dan pengungkapan tindak pidana narkoba diwilayah hukum Polres Rembang? 3). Hambatan-hambatan apa yang ditemui para penyidik dan solusinya dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana diwilayah hukum Polres Rembang? Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : 1). Polres Rembang termasuk dalam wilayah hukum Polri Jateng dengan jumlah kasus narkoba sebanyak 1.493 kasus. Provinsi Jawa Timur dalam tiga tahun terakhir masih menempati urutan pertama jumlah kasus narkoba berdasarkan provinsi. Begitu pula menurut jumlah tersangka narkoba, Provinsi Jawa Timur menempati urutan pertama dan mengalami peningkatan dari tahun 2010 – 2012 (6.395 tersangka di tahun 2010 meningkat menjadi 8.142 tersangka di tahun 2012). Beberapa provinsi mengalami peningkatan jumlah tersangka dari tahun 2010 - 2012 antara lain Aceh (peningkatan 392 tersangka), Sulawesi Utara (peningkatan 789 tersangka), dan Kalimantan Selatan (peningkatan 802 tersangka). 2). Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba oleh tersangka a.n. Kusmanto alias Pithi Bin (Alm) Darnawi . Terkait pelanggaran Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi sebagai berikut : *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I(satu) bukan tanaman, diPidana dengan Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12(dua belas) tahun dan Pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah)*". 3). Beberapa hambatan dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan maupun penjualan Narkotika adalah sebagai berikut : a. Kebijaksanaan Nasional. b. Tingginya angka prevalensi. c. Minimnya tempat rehabilitasi.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penyidik, Narkoba

ABSTRACT

Reasearch entitled "Analysis of the Role of Police Investigators in the Handling of Drug Crime at Rembang Polres Central Java". Based on the description in this Thesis, the issues that will be in detail are: 1). Is drug abuse taking place in the jurisdiction of Rembang Police? 2). What is the role of police investigators in the handling and disclosure of drug crime in Rembang Police? 3). What are the obstacles encountered by the investigators and their solution in investigating crime in Rembang Police Region?

The results concluded that: 1). Rembang Police is included in the jurisdiction of Central Java Police with

1,493 cases of narcotics cases. East Java province in the last three years still ranks first number of drug cases by province. Similarly, according to the number of drug suspects, East Java Province ranks first and increased from 2010 to 2012 (6,395 suspects in 2010 increased to 8,142 suspects in 2012). Several provinces experienced an increase in the number of suspects from 2010 to 2012 including Aceh (increase of 392 suspects), North Sulawesi (increase in 789 suspects), and South Kalimantan (increase of 802 suspects). 2). Implementation of law enforcement on the crime of drugs by suspect a.n. Kusmanto alias Pithi Bin (Alm) Darnawi. Related to the violation of Article 112 Paragraph (1) of RI Law No.35 of 2009 concerning Narcotics which reads as follows: Every person who without right or unlawfully owns, keeps, controls or provides narcotics Group I (one) not plant, in Criminal Criminal imprisonment of at least 4 (four) years and no later than 12 (twelve) years and a fine of at least Rp. 800,000,000.00 (eight hundred million rupiah) and at most Rp 8,000,000,000.00 (eight billion rupiahs) ". 3). Some of the obstacles in the investigation of criminal acts of abuse or sale of Narcotics are as follows: a. National Policy. b. High prevalence rates. c. The lack of rehabilitation.

Keywords: Crime, Investigators, Drugs

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum di harapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.¹ Penyalahgunaan narkoba berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia tindak pidana internasional. Mafia perdagangan gelap memasok narkoba agar orang memiliki ketergantungan sehingga jumlah *supply* meningkat. Terjalinnya hubungan antara pengedar/bandar dengan korban membuat korban sulit melepaskan diri dari pengedar/bandar, bahkan tidak jarang korban juga terlibat peredaran gelap karena meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan mereka akan narkoba.²

Tindak pidana narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkoba. Perkembangan kualitas tindak pidana narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia. Meskipun narkoba sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa.³

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah sampai pada titik yang menghawatirkan. Berdasarkan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia Tahun 2015 tentang Survei Nasional Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba pada Kelompok Rumah Tangga, diketahui bahwa angka prevalensi penyalahguna Narkoba di

¹ Bambang Hariyono, 2009. *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Indonesia*. Penelitian Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm.23

² Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm.1.

³ Muhammad Taufik Makarao, 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia. Jakarta., hlm.26

Indonesia telah mencapai 2,20% atau 4.098.029 orang yang pernah pakai narkoba dalam setahun terakhir (current users) pada kelompok usia 10-59 tahun⁴.

Jenis narkoba yang banyak dikonsumsi dalam setahun terakhir tetap masih ganja. Sekitar 1 dari 5 orang penyalahguna masih tetap mengkonsumsi ganja (25%). Berikutnya shabu (12%), ekstasi (5%) dan tramadol (5%). Satu dari 8 orang penyalahguna mengkonsumsi shabu, sedangkan ekstasi dan tramadol lebih jarang lagi, yaitu 1 dari 20 orang. Sedangkan jenis narkoba lainnya kurang dari 4%.⁵

Sementara untuk sitaan barang bukti di tahun 2015 jenis ganja, persentase peningkatan terbesar terjadi pada luas areal ganja yang ditemukan dengan persentase 1.089,29% dari 14 Hektar yang ditemukan di tahun 2014 menjadi 166,5 Hektar yang ditemukan di Tahun 2015. Terjadi penurunan yang sangat signifikan pada sitaan biji ganja dengan persentase penurunan 98,34% dari 378,33 gram yang disita di tahun 2014 menjadi hanya 6,28 gram di Tahun 2015. Terjadi perbandingan terbalik antara peningkatan luas area ganja yang ditemukan dan pohon ganja yang disita dengan menurunnya daun ganja dan biji ganja yang disita di Tahun 2015. Untuk sitaan barang bukti jenis narkotika Tahun 2015, persentase peningkatan terbesar terdapat pada sitaan barang bukti ekstasi dengan persentase 304,16% dari 490.121,25 tablet yang disita di tahun 2014 menjadi 1.980.873 tablet yang disita di Tahun 2015. Sedangkan persentase penurunan terbesar yaitu pada persentase penurunan jumlah kokain yang disita dari 373,33 gram yang disita di Tahun 2014 menjadi 10,54 gram yang disita di tahun 2015 dengan persentase penurunan 97,18%. Sedangkan untuk sitaan barang bukti jenis psikotropika Tahun 2015, terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap jumlah sitaan barang bukti Benzodiazepine dengan persentase 249,91% dari 356.631 tablet yang disita di tahun 2014 menjadi 1.247.895 tablet yang disita di Tahun 2015. Sedangkan penurunan terbesar terjadi pada sitaan barang bukti Daftar G dengan persentase 88,82% dari 14.729.227,75 tablet yang disita pada tahun 2014 menjadi 1.646.224,5 tablet di Tahun 2015⁶.

Salah satu bagian aparat penegak hukum yang juga mempunyai peranan penting terhadap adanya kasus penyalahgunaan narkoba ialah "Penyidik", dalam hlm ini penyidik Polri, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran penyalahgunaan narkoba. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yang mengatur sanksi hukumnya serta hlm-hlm yang diperbolehkan, dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut, maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba dewasa ini.⁷

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika dan psikotropika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika dan psikotropika ini belum dapat diredakan. Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan

⁴ Badan Narkotika Nasional, *Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN*. 2016. Data Hasil Kegiatan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN Tahun 2015. Jakarta, Indonesia.

⁵ Badan Narkotika Nasional, Balai Besar Rehabilitasi BNN. 2016. *Data Penyalahguna yang Dirawat di Balai Besar Rehabilitasi BNN Tahun 2015*. Jakarta, Indonesia.

⁶ Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2016. *Data Kasus dan Tersangka serta Barang Bukti Tindak Pidana Narkoba yang Berhasil Disita oleh Polri Tahun 2015*. Jakarta, Indonesia.

⁷ Moeljanto. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pradnya Paramita.hlm.78

bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.⁸

Penegakan hukum dengan mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hlm yakni: (1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif; (3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.⁹

Berdasarkan alasan tersebut di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berjudul : “Analisa Peranan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba di Polres Rembang Jawa Tengah”. Dari uraian tersebut diatas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah penyalahgunaan narkoba terjadi di wilayah hukum Polres Rembang ? Bagaimana peran penyidik Polri dalam penanganan dan pengungkapan tindak pidana narkoba diwilayah hukum Polres Rembang? Hambatan-hambatan apa yang ditemui para penyidik dan solusinya dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana diwilayah hukum Polres Rembang?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan¹⁰. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas- asas hukum, taraf sinkronisasi hukum¹¹ Pendekatan penelitian yang digunakan Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *yuridis sosiologis*. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala sosiologis yang berdampak bagi masyarakat.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi : Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder, dan Bahan

Bahan hukum primer, yang terdiri dari : 1) Undang-Undang Dasar 1945, 2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, 3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 4) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Bahan hukum sekunder berupa Buku-buku, dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah Peranan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari : Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya. Penelitian ini menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan)

⁸ O.C. Kaligis & Associates. 2002. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Bandung: Alumni. Hlm. 260.

⁹ Siswanto Sunarso. 2004. *Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 142.

¹⁰ Ediwarman, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2010, hlm. 24

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001 hlm. 13-14

yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

Metode analisa data yang digunakan adalah analisa normatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan. Dari analisis tersebut dapat diketahui efektifitas sistem hukum yang bersifat edukatif terhadap masyarakat dalam mengetahui Peranan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Normatif Kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan - peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

Pembahasan

Penyalahgunaan Narkoba Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polres Rembang.

Meningkatnya populasi penyalah guna narkoba membuat pemerintah perlu mengambil langkah yang tepat untuk menurunkan jumlah penyalah guna dan menyelamatkan penyalah guna narkoba. Upaya tersebut ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengamanatkan pencegahan, perlindungan, dan penyelamatan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkoba¹².

Menurut Direktorat Bina Upaya Kesehatan, pada tahun 2010 tercatat pula sebanyak 434 pasien rawat inap di Rumah Sakit karena gangguan mental dan perilaku yang disebabkan penggunaan alkohol. Dari jumlah tersebut, 32 pasien diantaranya meninggal dunia. Berdasarkan laporan Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO), pasien rawat inap mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dalam 5 tahun terakhir. Efek negatif narkoba dan meningkatnya jumlah penyalah guna mendesak pemerintah untuk lebih serius dalam penanggulangannya serta menentukan strategi yang tepat guna menanggulangi penyalahgunaan narkoba.¹³

Data dan informasi mengenai narkoba di banyak negara masih sangat sulit diperoleh, sehingga jumlah penyalah guna adalah berupa perkiraan atau angka estimasi saja. Sama halnya dengan Indonesia, jumlah penyalah guna sangat sulit diketahui antara lain :¹⁴

- (1) Sebagian besar penyalah guna tidak muncul ke permukaan, karena stigma yang ada di masyarakat, takut dilaporkan, dan berbagai sebab lainnya.
- (2) Belum ada sistem pelaporan yang baku (pelaporan yang sifatnya baku hanya ada di Rumah Sakit) dan
- (3) Penyalah guna yang datang ke pusat-pusat pengobatan dan rehabilitasi hanya sebagian kecil.
- (4) Penyebaran penyalah guna tidak merata, diduga *urban – biased*, sehingga sulit untuk membuat

¹² M. Arief Hakim, 2004. *Bahaya Narkoba- Alkohol: cara islam mencegah, mengatasi dan melawan*, Bandung: Nuansa.hlm. 89

¹³ Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan. Kementerian Kesehatan RI 2014.ISSN – 270X

¹⁴ Djoko Prakoso. Bambang Riyadi Lany dan Muhksin, 1987. *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Bina Aksara. Jakarta.hlm. 34

sampling.

(5) *Community –based survey* sangat sulit dilakukan, tetapi beberapa LSM sudah melakukan survey sejenis.

Ditinjau dari jenisnya, ketergantungan narkoba merupakan penyakit mental dan perilaku yang dapat berdampak pada kondisi kejiwaan yang bersangkutan dan masalah lingkungan sosial. Ditinjau dari sejumlah kasus, walaupun tidak ada data yang pasti mengenai jumlah kasus penyalah guna narkoba, namun diperkirakan beberapa tahun terakhir jumlah kasus penyalah guna narkoba cenderung semakin meningkat. Masyarakat secara umum memandang masalah gangguan penggunaan narkoba lebih sebagai masalah moral daripada masalah kesehatan.

Peran Penyidik Polri Dalam Penanganan Dan Pengungkapan Tindak Pidana Narkoba Diwilayah Hukum Polres Rembang.

Laporan Polisi Nomor : LP/A/82/IX/2016/Jateng/Res Rembang, tanggal 27 September 2016, dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor. : SP. Kap/21/IX/2016/Sat Resnarkoba, tanggal 27 September 2016, telah melakukan Penangkapan terhadap tersangka Kusmanto alias Pithi Bin (Alm) terkait pelanggaran Pasal 114 Ayat (1) Subsider Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I subsider Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang di duga jenis sabu yang terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira pukul 18.15 Wib di depan warung makan 57 yang berada dipinggir jalan raya pantura turut tanah Desa Purworejo Kec Kaliori Kab Rembang”.

Berdasarkan informasi yang didapat oleh Penyidik, maka telah dilakukan pengeledahan berdasarkan Surat Perintah Pengeledahan Nomor : SP.Dah/25/X/2016/Sat Resnarkoba Tanggal 27 September 2016, yang dikuatkan dengan Persetujuan Pengeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Rembang yang berupa Penetapan Pengeledahan Nomor : 34/Pen. Pid/2016/PN. Rbg. Tanggal 03 Oktober 2016. Telah dilakukan pengeledahan badan terhadap tersangka an. Kusmanto alias Pithi Bin(Alm) dengan barang bukti sebagai berikut :

- a. 9 (sembilan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening yang dimasukkan dalam bekas bungkus permen Tamarin dan dimasukan lagi dalam bekas bungkus permen Big Babol wana pink.
- b. 1(satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna hitam putih.
- c. 1(satu) buah kunci kontak.
- d. 1(satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam.
- e. 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisi :
 - Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 - 1(satu) buah KTP atas nama KUSMANTO.
 - 1(satu) buah ATM BRI warna biru.
 - 7 (tujuh) buah permen Tamarin.

Hasil Pemeriksaan Ahli Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1484/NNF/2016 tanggal 28 September 2016, kemudian diberi nomor barang bukti BB-3044/2016/NNF berupa 9 (sembilan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening yang

dimasukkan dalam bekas bungkus permen Tamarin dan dimasukan lagi dalam bekas bungkus permen Big Babol warna pink berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 1,289 gram kemudian disimpulkan bahwa **BB-3044/2016/NNF** berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**. Sisa Barang Bukti **BB-3044/2016/NNF** sisanya berupa serbuk kristal dengan berat **1,282 gram**.

Hambatan-hambatan apa yang ditemui para penyidik dan solusinya dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana diwilayah hukum Polres Rembang.

Untuk dapat memulai penyidikan tindak pidana penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu harus terdapat fakta-fakta yang lengkap, bukti permulaan yang cukup dan terdeteksi/teridentifikasinya tersangka. Dalam upaya menangani kasus-kasus yang terjadi, para penyidik melakukan analogi atau perumpamaan dan persamaan terhadap pasal-pasal yang ada dalam KUHP. Beberapa hambatan dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan maupun penjualan Narkotika adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Kebijaksanaan Nasional

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengamanatkan pencegahan, perlindungan, dan penyelamatan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika, pada Pasal 54 disebutkan bahwa “korban penyalah guna dan pecandu narkotika wajib direhabilitasi”. Amanat undang-undang tersebut sesuai dengan konsep penyalahgunaan narkotika dari segi kesehatan, namun belum dilakukan secara maksimal.

2. Tingginya Angka Prevalensi

Dari hasil Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2011 yang merupakan kerjasama antara Badan Narkotika Nasional dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, diketahui bahwa angka prevalensi penyalah guna narkoba (yang menggunakan narkoba dalam setahun terakhir sebelum survei) pada populasi usia 10-59 tahun telah mencapai 2,2% atau sekitar 4,2 juta orang. Kemudian menurut tingkat ketergantungan penggunaan narkoba (adiksi) diklasifikasikan pengguna coba pakai sebesar 27% atau sekitar 1,15 juta orang, pengguna teratur pakai (3 hari dalam 1 minggu) sebesar 45% atau sekitar 1,89 juta orang, dan pecandu sebesar 28% atau 1,19 juta orang.

3. Minimnya Tempat Rehabilitasi

Penyalah guna narkoba secara keseluruhan memerlukan perawatan rehabilitasi sesuai dengan tingkat ketergantungan berikut:

- a. Ringan dengan kriteria pengguna coba-coba, pengguna rekreasional, dan pengguna situasional. Pada tingkat ini orang secara situasional dapat menggunakan untuk mencari kesenangan atau bersosialisasi;
- b. Sedang dengan kriteria pengguna narkoba yang dilakukan secara terus menerus dengan penggunaan teratur 3 hari per minggu baik satu atau lebih jenis narkoba;
- c. Berat adalah pengguna paling parah dan berbahaya dengan dosis tinggi secara rutin atau setiap hari (bisa beberapa kali dalam sehari) dan menimbulkan efek psikis dan psikologis.

Sementara itu terbatasnya tempat rehabilitasi bagi penyalah guna yaitu hanya mampu

¹⁵ Brigjen Pol. Ida Oetari Poernamasasi, S.AP Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah Deputy Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional.

merehabilitasi 18.000 orang per tahun, termasuk tempat rehabilitasi yang dimiliki oleh BNN sebanyak 4 tempat rehabilitasi dengan kapasitas 1.300 orang.

4. Paradigma Masyarakat Indonesia dan Aparat Penegak Hukum

Mindset masyarakat terhadap penyalah guna narkoba, yaitu masyarakat belum punya budaya merehabilitasi secara sukarela karena *stereotype* bahwa keluarga yang kena narkoba merupakan **aib**. Masyarakat masih belum berani melapor karena takut ditangkap dan masih berpendapat bahwa pemenjaraan akan memberikan efek jera, padahal sebaliknya di lapas merupakan tempat meningkatkan kualitas. Secara empiris penegak hukum masih memiliki budaya pemidanaan lebih menonjol dihadapkan dengan pemidanaan dengan rehabilitasi, padahal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah mengatur rehabilitasi adalah alternatif lain dari hukuman penjara. Dampaknya lapas dan rutan mengalami *over capacity*, di mana 50%60% penghuni WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) adalah kasus narkoba. Kondisi ini tidak memungkinkan untuk dilakukan pemisahan antara WBP kasus narkoba yang berperan sebagai kurir, bandar maupun sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Proses rehabilitasi di dalam lapas belum memungkinkan untuk dilakukan karena keterbatasan petugas, ruang dan masih disinyalir masih ada peredaran gelap narkoba dalam lapas.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Polres Rembang termasuk dalam wilayah hukum Polri Jateng dengan jumlah kasus narkoba sebanyak 1.493 kasus. Selama kurun waktu terakhir, Provinsi Jawa Timur dalam tiga tahun terakhir masih menempati urutan pertama jumlah kasus narkoba berdasarkan provinsi. Data dan informasi mengenai narkoba di banyak negara masih sangat sulit diperoleh, sehingga jumlah penyalah guna adalah berupa perkiraan atau angka estimasi saja. Sama halnya dengan Indonesia, jumlah penyalah guna sangat sulit diketahui antara lain :
 - (1) Sebagian besar penyalah guna tidak muncul ke permukaan, karena stigma yang ada di masyarakat, takut dilaporkan, dan berbagai sebab lainnya.
 - (2) Belum ada sistem pelaporan yang baku (pelaporan yang sifatnya baku hanya ada di Rumah Sakit) dan
 - (3) Penyalah guna yang datang ke pusat-pusat pengobatan dan rehabilitasi hanya sebagian kecil.
 - (4) Penyebaran penyalah guna tidak merata, diduga *urban – biased*, sehingga sulit untuk membuat *sampling*.
 - (5) *Community –based survey* sangat sulit dilakukan, tetapi beberapa LSM sudah melakukan survey sejenis.
2. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan serta penyalahgunaan narkoba oleh tersangka Kusmanto alias Pithi Bin (Alm) Darnawi terbukti telah memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu sebanyak 9 (sembilan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening yang dimasukkan dalam bekas bungkus permen Tamarin dan dimasukan lagi dalam bekas bungkus permen Big Babol wana pink dipersangkakan telah melanggar Pasal 114 Ayat (1) Subsider Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
3. Beberapa hambatan dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan maupun penjualan Narkotika di wilayah hukum Polres Rembang adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Nasional
2. Tingginya Angka Prevalensi
3. Minimnya Tempat Rehabilitasi
4. Paradigma Masyarakat Indonesia dan Aparat Penegak Hukum

Adapun solusi untuk menekan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam proses penyidikan di wilayah hukum Rembang adalah sebagai berikut :

1. Merubah paradigma baru Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yaitu keseimbangan antara penindakan dan rehabilitasi.
Implementasi dari perubahan paradigma dimaksud adalah:
 - a. Program Depenalisasi
 - b. Dekriminalisasi
2. Menyediakan tempat rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Hariyono, 2009. *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Indonesia*. Penelitian Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan. Kementerian Kesehatan RI 2014.ISSN – 270X.
- Djoko Prakoso. Bambang Riyadi Lany dan Muhksin, 1987. *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Bina Aksara. Jakarta.
- Ediwarman, 2010. *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.
- M. Arief Hakim, 2004. *Bahaya Narkoba- Alkohol: cara islam mencegah, mengatasi dan melawan*, Bandung: Nuansa.
- Moeljanto. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*. Pradnya Paramita.
- Muhammad Taufik Makarao, 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- O.C. Kaligis & Associates, 2002. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Bandung: Alumni.
- Siswanto Sunarso. 2004. *Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Badan Narkotika Nasional, Balai Besar Rehabilitasi BNN. 2016. *Data Penyalahguna yang Dirawat di Balai Besar Rehabilitasi BNN Tahun 2015*. Jakarta, Indonesia.

- Badan Narkotika Nasional, *Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN*. 2016. Data Hasil Kegiatan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN Tahun 2015. Jakarta, Indonesia.
- Brigjen Pol. Ida Oetari Poernamasasi, S.AP Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2016. *Data Kasus dan Tersangka serta Barang Bukti Tindak Pidana Narkoba yang Berhasil Disita oleh Polri Tahun 2015*. Jakarta, Indonesia.